

**PETA RESIKO**  
**BIDANG PROGRAM DAN INFORMASI PPPPTK PENJAS DAN BK 2017**

No	Aktivitas	Pernyataan Resiko	Dampak	Penyebab	Level Risiko	Kejadian	Pemilik Risiko	Pengendalian yang Ada	Pengendalian Yang Seharusnya Ada	Rencana Tindak Lanjut Pengendalian
1	<b>Penyusunan Program Diklat Kurikulum 13 (K13)</b> 1.1. Penyusunan Program Kerja	Jadwal kegiatan yang belum pasti/ sering berubah-ubah	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan rencana	Fasilitas pendukung kegiatan belum siap: KAK/TOR, Juklak/ Juknis	Tinggi	Sering	Kepala P4TK, Bidang Program dan Informasi, Seksi Program	SOP internal sudah ada	1. Juklak dan Juknis tentang guru pembelajar segera disyahkan dan diterbitkan oleh Dirjen GTK 2. Memverifikasi ulang data dan informasi guru pembelajar di setiap Dinas Kab/Kota	1. Persiapan lebih matang dan koordinasi lebih intensif  2. Penetapan NS, IN, dan sasaran by name
	1.2. Pengumpulan dan pengolahan data	1. Data dan informasi peserta diklat yang belum valid  2. Tidak semua peserta dapat mengikuti kegiatan diklat pada tahun ini	1. Mempengaruhi kepastian pelaksanaan kegiatan  2. Sasaran peserta tidak tercapai	1. Kesalahan menganalisis/ menelaah data dan informasi hasil UKG dalam rangka penetapan peserta diklat  2. Alokasi anggaran terbatas  3. Koordinasi dengan para pihak terkait belum optimal	Tinggi  Tinggi  Tinggi	Sering  Sering  Sering	Kepala P4TK, Bidang Program dan Informasi, Seksi Data Informasi	SOP internal sudah ada	1. Dibuatkan Juklak dan Juknis tentang guru pembelajar dari Ditjen GTK  2. Memverifikasi ulang data dan informasi guru pembelajar di setiap Dinas Kab/Kota  3. Intensitas koordinasi dengan Dinas Kab./Kota untuk dana sharingnya	1. Persiapan lebih matang dan koordinasi lebih intensif  2. Menetapkan moda bagi peserta guru pembelajar by name
	1.3. Kerjasama/Kemitraan dalam rangka pelaksanaan diklat PKB	Data dan informasi dari Dinas Pendidikan untuk kegiatan diklat PKB kurang optimal	Pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat	Kurangnya koordinasi dengan Dinas Pendidikan	Tinggi	Sering	Kepala P4TK, Bidang Program dan Informasi, Seksi Program	Kriteria peserta sudah ditetapkan	Koordinasi P4TK dengan Dinas Pendidikan terkait	Melaksanakan Koordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait rekonsiliasi data secara rutin
	1.4. Pengembangan Model Pembelajaran/Modul	1. Modul tidak selesai tepat waktu	1. Pelaksanaan kegiatan akan mundur dari jadwal yang telah ditetapkan	1. Adanya perubahan kebijakan mengenai standar penyusunan modul	Tinggi	Sering	Kepala P4TK, Bidang Program dan Informasi, Seksi Program	Standar penyusunan modul awal	Penetapan standar penyusunan modul yang baku	Melakukan sosialisasi penyusunan modul yang baku

**PETA RESIKO PPPPTK PENJAS DAN BK  
BIDANG FASILITASI 2017**

No	Aktivitas	Pernyataan Resiko	Dampak	Penyebab	Level Risiko	Kejadian	Pemilik Risiko	Pengendalian yang Ada	Pengendalian yang Seharusnya Ada	Rencana Tindak Lanjut Pengendalian
1	Diklat Kurikulum 13 (K13) A. Persiapan	1. Alokasi Waktu pengiriman surat undangan kepada peserta dan narasumber terbatas	dapat mempengaruhi Jumlah peserta yang hadir	Birokrasi yang panjang dan perubahan jadwal karena kebijakan pimpinan	Tinggi	Sering	Kepala Pusat, Kepala Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi, Kepala Seksi Penyelenggaraan	Undangan dikirim via email dan kantor pos	Data informasi peserta diklat ditembuskan ke sekolah masing-masing	Memantau proses waktu pengiriman surat undangan dan memastikan koordinasi berjalan antara seksi data dan informasi dengan seksi penyelenggaraan.
		2. proses penyusunan buku Panduan/Juknis belum selesai	Informasi kegiatan tidak tersampaikan ke peserta, panitia dan narsum	data dan informasi mengenai bahan kegiatan terlambat diterima oleh seksi penyelenggaraan	Sedang	Jarang			data dan informasi mengenai bahan penyusunan buku panduan harus di terima tepat waktu	Memantau proses penyusunan buku panduan/juknis dan memastikan koordinasi berjalan antara seksi penyelenggaraan dengan seksi program dan seksi data dan informasi
		3. SK kegiatan terlambat ditetapkan	Pencairan anggaran terlambat direalisasikan	data nama peserta, panitia dan narsum seringkali berubah	Tinggi	Sering		koordinasi yang intensif antara seksi penyelenggaraan dan subbag tatalaksana dan kepegawaian	Koordinasi yang intensif antara keuangan dan penyelenggaraan	Memantau proses penetapan SK dan memastikan koordinasi berjalan antara seksi penyelenggaraan dengan subbag perencanaan dan penganggaran
		4. ketidak sesuaian antara analisis kebutuhan diklat dengan ketersediaan bahan diklat (modul, ATK dan sarpras)	kegiatan belajar mengajar terganggu	data yang diterima oleh bidang fasilitasi tidak sesuai	Sedang	Jarang		format pengajuan alat dan bahan	koordinasi bidang fasilitasi dengan bagian umum	Memantau proses pengajuan alat dan bahan dan memastikan koordinasi berjalan antara seksi penyelenggaraan, widyaiswara, dan subbag TU dan RT
		5. Pusat belajar guru bidang studi pada region sumsel dan banten belum selesai ditetapkan oleh P4TK Penjas dan BK	Diklat Kurikulum 13 (K13) terancam tertunda/tidak dapat dilaksanakan	1. Koordinasi antar P4TK dengan dinas kab/kot sumsel dan banten belum dilaksanakan 2. Data guru per mapel kurang akurat/sering berubah	Tinggi	Sering	Dinas dan antar P	MOU antara P4TK dengan Dinas kab/kot	Mengintensifkan koordinasi antar P4TK dan dinas kab/kot  Memvalidasi dan memastikan data guru per mapel	Segera merealisasikan penetapan pusat belajar
	B. Pelaksanaan	1. ketidak lengkapan penyerahan dokumen persyaratan peserta pada saat registrasi	kegiatan tidak dapat dipertanggung jawabkan	1 Kekurang patuhan peserta pada syarat pemanggilan/undangan	Tinggi	Jarang		Fomat-format penyelenggaraan diklat	Membuat surat pernyataan pertanggungjawab an	Memeriksa format ceklist penyerahan dokumen persyaratan peserta, menilai SOP dan menilai pengendalian resiko berjalan atau tidak

No	Aktivitas	Pernyataan Resiko	Dampak	Penyebab	Level Risiko	Kejadian	Pemilik Risiko	Pengendalian yang Ada	Pengendalian Yang Seharusnya Ada	Rencana Tindak Lanjut Pengendalian	
	C. Evaluasi	2 Soal ujian belum disesuaikan dengan jenjang diklat yang diikuti	mutu hasil diklat diragukan	2 ketidak telitian panitia pada saat registrasi kurangnya pengendalian manajemen terhadap proses kegiatan belajar mengajar	Tinggi	Jarang		Ceklist naskah soal	Bank soal pada setiap jenjang diklat	Memantau proses pembuatan soal ujian dan memastikan koordinasi berjalan antara Widyaiswara dan seksi penyelenggaraan	
		1 Instrumen evaluasi diklat hasilnya tidak digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja	kinerja penyelenggaraan diklat sulit untuk diukur tingkat keberhasilannya	kelemahan koordinasi antar seksi dan subbag terkait,	Tinggi	Jarang		Rekap hasil evaluasi	Hasil evaluasi penyelenggaraan diklat disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan dijadikan pedoman bagi pimpinan dan komitmen bersama dalam rangka pemberian reward dan punishment	Memantau proses hasil evaluasi instrumen diklat dan memastikan koordinasi berjalan antara seksi penyelenggaraan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil evaluasi penyelenggaraan diklat	
		2 hasil evaluasi diklat tidak ditindak lanjuti		kurangnya komitmen pihak penyelenggara							
		3. kriteria penilaian kelulusan peserta diklat belum terstandar	penilaian hasil diklat kurang obyektif	pihak penyelenggara belum menetapkan kriteria standar penilaian kelulusan peserta diklat	Tinggi	Sering		Instrumen pengolahan nilai	Dibuat pedoman tentang kriteria/indikator dalam penilaian	Menyisipkan pedoman tentang kriteria/indikator dalam penilaian di dalam Juknis kegiatan diklat	
		3. kesalahan penyetikan pada STTPL	tidak bisa digunakan untuk pengajuan DUPAK	Kekurang telitian petugas dalam melakukan input data	Rendah	Jarang		Konfirmasi data diteliti kembali oleh peserta	Konfirmasi data dilampirkan pada sertifikat yang akan dimintakan tanda tangan.	Memantau proses pembuatan/penyetikan STTPL dan memastikan koordinasi berjalan antara panitia dengan seksi evaluasi	

**PENILAIAN RESIKO PADA PPPPTK PENJAS DAN BK  
TAHUN ANGGARAN 2017  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

No	Aktivitas	Pernyataan Resiko	Dampak	Penyebab		Level Risiko	Kejadian	Pemilik Risiko	Pengendalian Yang Ada	Pengendalian Yang Seharusnya Ada	Rencana Tindak Lanjut Pengendalian
1	2	3	4	8							
1	PPPPTK PENJAS DAN BK	A <u>Keuangan</u> 1 <u>Perjalanan</u> Dinas	1 Jumlah petugas yang melaksanakan perjalanan dinas kurang proporsional	Pemborosan keuangan negara	Kurang memahami perencanaan dan peraturan yang terkait	Rendah	Rendah	PRP	Proposal dan usulan petugas dari unit terkait	Koordinasi dan verifikasi petugas	Meningkatkan pengendalian melalui SOP
			2 Perhitungan kebutuhan biaya perjalanan dinas tidak sesuai dengan kondisi riil	Inkonsistensi	Kurang memahami kondisi lokasi atau daerah kegiatan	Rendah	Rendah	PRP	Mengikuti SBM dengan pagu terendah	Penyusunan anggaran yang tepat	Koordinasi dengan dinas kab/kota setempat
			3 Indikasi pelaksanaan perjalanan dinas yang dilakukan pada waktu yang bersamaan	Potensi kerugian keuangan negara	Tidak ada pemetaan perjalan dinas pegawai	Rendah	Rendah	Kepegawaian dan Penyelenggaraan	Format usulan dinas pegawai	Dibuat aplikasi surat penugasan pegawai	Pemutakhiran aplikasi
			4 Bukti administrasi kelengkapan perjalanan dinas tidak memadai, tidak lengkap, dan tidak valid	Tidak tertib administrasi	Kurang memahami pentingnya kelengkapan perjalanan dinas	Rendah	Rendah	PRP	Uang muka perjalanan dinas	Sosialisasi kelengkapan administrasi perjalanan dinas, sesuai pada permenkeu no 113 tahun 2012	Sosialisasi permenkeu tentang perjalanan dinas pegawai
			5 Pelaksanaan perjalanan dinas fiktif	Kerugian keuangan negara	Tingkat kesadaran pegawai rendah	Tinggi	Rendah	PRP	Fakta integritas pegawai	Sosialisasi peraturan tentang Tindak Pidana Korupsi	Pemberian sanksi oleh pimpinan
			6 Potongan pajak yang tidak disetor	Kerugian keuangan negara	Kelalaian	Sedang	Rendah	PRP	Pencatatan setor pajak	Harus ada pemantauan dari atasan langsung	Pemutakhiran dokumen administrasi
			7 Terjadi <i>mark up</i> dalam konsumsi dan akomodasi	Kerugian keuangan negara	Tingkat kesadaran pegawai rendah	Tinggi	Tinggi	PRP	Bukti tagihan	Pengujian bukti tagihan oleh Bendahara	Pemberian sanksi oleh pimpinan
			8 Dokumen administrasi honorarium setiap kegiatan tidak lengkap dan salah potong pajak	Kurugian Negara dan Tidak lengkap administrasi	Kurang memahami SBM dan peraturan terkait	Rendah	Rendah	PRP	Bukti penerimaan honor	Harus ada pemantauan dari atasan langsung	Meningkatkan pemahaman pegawai keuangan tentang pentingnya dokumen keuangan
			2 <b>Paket Meeting</b>	1 Administrasi tidak sesuai dan kurang lengkap	Tidak bisa dibayarkan dan Tidak tertib administrasi	Tidak faham peraturan terkait	Tinggi	Rendah	PRP	Dokumen pengadaan paket meeting dan SPJ	Ada matrik kelengkapan dokumen pengadaan dan SPJ
				2 Perubahan peserta, panitia, dan narasumber tidak disertai berita acara perubahan Surat Tugas/SK	Kerugian keuangan negara	Kurang koordinasi antara petugas dengan pihak penyedia	Sedang	Rendah	PRP	Berita acara kehadiran peserta	POS penyelenggaraan kegiatan

No	Aktivitas	Pernyataan Resiko	Dampak	Penyebab		Level Risiko	Kejadian	Pemilik Risiko	Pengendalian Yang Ada	Pengendalian Yang Seharusnya Ada	Rencana Tindak Lanjut Pengendalian
1	2	3	4	8							
		<b>B Pengadaan</b>									
		<b>1 Pengadaan Barang/Jasa</b>	1 RUP barang/jasa tidak dibuat dan diumumkan	Transparansi dan akuntabilitas	Kurang faham tentang peraturan	Sedang	Rendah	TURT/ULP	Proker institusi	Koordinasi dengan unit terkait	Pemutakhiran RUP setiap revisi RKAKL
			2 Perencanaan awal pengadaan barang/jasa tidak berdasarkan usulan dari unit kerja	Tidak tepat sasaran dan pemborosan	Kurang koordinasi dengan unit terkait	Sedang	Rendah	PPK	Formulir usulan manual	Master Plan	Sosialisasi dan finalisasi Master Plan dengan unit terkait
			3 Proses pengadaan penunjukan langsung dan/atau tidak langsung tidak transparan	Transparansi dan akuntabilitas	Kurang faham tentang peraturan	Sedang	Rendah	PPK	Dokumen pengadaan	Matriks pengadaan	Workshop dengan unit terkait tentang Matriks pengadaan
			4 Terjadi <i>mark up</i> harga	Kerugian keuangan negara	Minimnya kontrol dari PPK	Tinggi	Sedang	PPK	Dokumen pengadaan	Matriks pengadaan	Pemutakhiran dokumen pengadaan, Survei harga pasar (internet/ brosur, toko, dan kontrak sejenis)
			5 Barang/jasa tidak sesuai dengan spesifikasi	Kerugian keuangan negara	Tidak cermatnya PPHP ( team pemeriksa dan penerima barang/Jasa)	Tinggi	Sedang	PPK	Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa	Kelengkapan dokumen (Surat jalan, faktur, dok pengadaan/spesifikasi, BA pemeriksaan)	Kelengkapan dokumen pengadaan dan progress laporan kemajuan pekerjaan
			6 Tidak ada jaminan pelaksanaan atas nama perusahaan > Rp. 200.000.000,-	Proses pengadaan tidak akuntabel	Tidak faham pejabat pengadaan dan ULP	Sedang	Rendah	PPK	Matrik pengadaan	Matrik pengadaan dan kesesuaian dokumen-dokumen	Peningkatan kompetensi pejabat pengadaan dan ULP
			7 Keterlambatan pekerjaan/kontrak kritis akhir tahun anggaran	Tidak bisa terbayarkan	Pengadaan terlambat	Sedang	Rendah	PPK	Proker kegiatan	Proker, KAK dan jadwal pengadaan	Penyesuaian jadwal pengadaan
		<b>2 Pengelolaan BMN</b>	1 Kesalahan alokasi belanja barang yang berubah menjadi aset tetap	Kesalahan pencatatan dalam SAK dan SIMAK-BMN	Ketidak fahaman mengenai akun-akun (RKAKL, LK dan Proses Pengadaan)	Sedang	Rendah	TURT	Aplikasi SIMAK-BMN	Aplikasi SIMAK-BMN dan pemantauan atasan	Peningkatan kompetensi SDM
			2 Data persediaan belum dimasukkan dalam SIMAK-BMN	Nilai persediaan dalam neraca tidak valid	Petugas SIMAK-BMN tidak faham/lalai	Sedang	Rendah	TURT	Aplikasi SIMAK-BMN	Aplikasi SIMAK-BMN dan pemantauan atasan	Pengelola keuangan memberikan dokumen sumber pada petugas

No	Aktivitas	Pernyataan Resiko	Dampak	Penyebab		Level Risiko	Kejadian	Pemilik Risiko	Pengendalian Yang Ada	Pengendalian Yang Seharusnya Ada	Rencana Tindak Lanjut Pengendalian
1	2	3	4	8							
			3 BMN tidak diidentifikasi dengan label dan kartu barang	Kehilangan aset	Petugas SIMAK-BMN tidak faham/lalai	Tinggi	Sedang	TURT	Kartu pengendali	Kartu pengendali barang, inventarisasi barang, aplikasi barang masuk&keluar	Pengelola BMN memberikan label pada seluruh barang inventaris
			4 BMN tidak dipelihara secara berkala	Pemanfaatan aset tidak optimal	Tidak ada pengecekan BMN secara berkala	Sedang	Tinggi	TURT	Kartu pengendali	Kartu pengendali, laporan petugas MR	Bagian Maintenance and Repair melakukan pemeliharaan BMN secara berkala serta berkoordinasi dengan unit terkait
			5 BMN yang rusak tidak dihapuskan	Terjadi penumpukan barang tidak terpakai	tidak faham sistem penghapusan	Tinggi	Sedang	TURT	Aplikasi SIMAK-BMN	Aplikasi SIMAK-BMN dan Laporan penanggungjawab ruangan	Pengelola BMN melakukan pendataan dan penghapusan BMN yang rusak berat
		<b>D Kepegawaian</b>	1 Daftar hadir elektronik tidak valid	Kerugian keuangan negara	Kedisiplinan pegawai rendah	Sedang	Rendah	Kasubag TL&Kepeg	Rekap daftar hadir pegawai bulanan	Absensi elektronik dengan CCTV dan absensi manual diunit kerja	Pemantauan atasan langsung, sesuai PP 53 th 2010
			2 Pembayaran tunjangan kinerja tidak sesuai jumlah kehadiran	Kerugian keuangan negara	Kurang ketelitian petugas keuangan dan kepegawaian	Rendah	Rendah	Kasubag TL&Kepeg dan PP	Rekap kehadiran elektronik	Pengecekan kehadiran antara kepegawaian, keuangan dan pegawai yang bersangkutan	Pemantauan, verifikasi dan validasi kehadiran pegawai oleh atasan langsung
			3 Penugasan tidak didasarkan hasil analisis kompetensi	Tujuan penugasan tidak tercapai	Ketidak sesuaian kompetensi petugas	Rendah	Rendah	Kasubag TL&Kepeg	Matriks kompetensi pegawai	Pemantauan matriks kompetensi pegawai oleh pimpinan	Penugasan harus disesuaikan dengan undangan dan matriks kompetensi pegawai
			4 Pembinaan pegawai bermasalah tidak dilakukan	Menghambat pelaksanaan program institusi	Kurang pengawasan atasan langsung	Rendah	Rendah	Atasan langsung	Sanksi teguran lisan dan tertulis	Sosialisasi PP 53 tahun 2010	Pendekatan secara kekeluargaan terhadap pegawai dan penerapan PP 53 tahun 2010
			5 Usulan Kenaikan pangat tidak dilakukan tepat waktu	Menurunnya kinerja pegawai	Kelalaian petugas kepegawaian	Rendah	Rendah	Kasubag TL&Kepeg	SIMPEG dan SAPK	Pemantauan SAPK secara periodik	Bagian kepegawaian melakukan pengurusan administrasi kepegawaian tepat waktu

No	Aktivitas	Pernyataan Risiko	Dampak	Penyebab	Level Risiko	Kejadian	Pemilik Risiko	Pengendalian Yang Ada	Pengendalian Yang Seharusnya Ada	Rencana Tindak Lanjut Pengendalian
1	2	3	4	8						

**CATATAN :**

- Risiko Tinggi : apabila permasalahan sering terjadi /berulang-ulang dan bersifat melanggar ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan kerugian negara.
- Risiko Sedang : apabila permasalahan tersebut bersifat pelanggaran yang berupa kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) yang tidak mempengaruhi kinerja satker secara signifikan.
- Risiko Rendah : apabila permasalahan tersebut bersifat administrasi dan tidak menimbulkan kerugian negara.